

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Negara dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengandatr Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, FH Unpad, Bandung, 2000.
- Bubau Kanturuna Mia Bari, *Buku Saku Hak atas Informasi (Hak-hak Atas Informasi)*, YAPPIKA, Baubau, 2011.
- Dhoho A. Sastro, *Mengenal Undang-Undang Ketebukaan Informasi Publik*, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Huukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo, Depok, 2018.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropli, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, PT RajaGrafindo, Depok, 2017.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

B. Jurnal, Tesis, dan Skripsi

- Desi Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, “Analisis Kinerja Komisi Informasi Koabupaten Cirebon dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Publika*, Vol 07: 1. 2019.

Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara das sein dan das solen)”, *Jurnal Perspektif*, Vol 17:1.2012.

Muhammad Zaky Alfayyadh, Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. 2021.

Nihlatul Solehah dan Cindy Aprianjani, “Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 01. 2019.

Rahmadhona Fitri Helmi, “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat”, *Journal of Education on Social Science*, Vol 03: 1, 2019.

Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol 12: 02. 2022.

Yori Edriani dan Abdul Sadad, “Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”, *JOM Fisip*, Vol 03: 02. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Internet

Suara Rakyat LBH Padang, “Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuhi”, diakses melalui <LBH Padang - Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh> [09/05/2024].

E. Lain-lain

Wawancara dengan Adrizal, S.H, Staf Advokasi LBH Padang [10/02/2025].

Wawancara dengan Defi Astina, S.H, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat [23/02/2025].

Wawancara dengan Kiki Eko Saputra, S.H. Asisten Ahli Bidang Sengketa di KI Sumatera Barat [04/02/2025].

